TASHARRUF
JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS

Tasharruf : Journal of Islamic Economics and Business | Page : 01 -14
Vol.07 - No.01 - Mei 2026 | e-ISSN/p-ISSN : 2962-8407/2962-1836
https://ejournal.unupasuruan.ac.id/index.php/tasharruf
DOI : https://doi.org/10.55757/tasharruf.v7i1.1271

Transformasi Akuntansi Syariah di Era Digital sebagai Landasan Transparansi dan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Ilham Wahyudi[1], Siti Kadariah [2], Zaenol Hasan [3]

[1] Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan, Indonesia
Email : ilhamjember@gmail.com
[2] Universitas Potensi Utama, Indonesia
Email : sitikadariah1920@gmail.com
[3] Institut KH Yazid Karimullah, Indonesia
Email : zaenhasan17@gmail.com

*Korespondensi: ilhamjember@gmail.com

Submit : **25/02/2026** | Review : **11/03/2026** | Accept : **11/04/2026** | Publish : **13/05/2026**

Abstrak

Perkembangan teknologi digital yang pesat membawa dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk industri keuangan syariah di Indonesia. Akuntansi syariah sebagai sistem pelaporan keuangan berbasis nilai Islam dituntut untuk beradaptasi dengan transformasi digital guna mempertahankan relevansinya. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana transformasi digital memengaruhi praktik akuntansi syariah serta mengkaji kontribusinya terhadap peningkatan transparansi dan kepercayaan publik pada lembaga keuangan syariah. Metode yang digunakan adalah kajian literatur deskriptif-konseptual dengan menganalisis berbagai sumber ilmiah, regulasi, dan laporan resmi lembaga terkait periode 2015–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa adopsi teknologi seperti blockchain, kecerdasan buatan, dan komputasi awan secara signifikan meningkatkan akurasi, aksesibilitas, dan ketepatan waktu pelaporan keuangan syariah. Transparansi yang meningkat melalui digitalisasi terbukti berkontribusi positif terhadap kepercayaan publik pada lembaga keuangan syariah. Namun demikian, tantangan berupa kesiapan sumber daya manusia, kesenjangan regulasi, dan literasi digital masyarakat masih perlu diatasi secara sistemis.

Kata kunci **:** *Akuntansi Syariah, Digitalisasi, Transparansi, Kepercayaan Publik, Lembaga Keuangan Syariah*

Abstract

The rapid development of digital technology has brought significant impacts across various sectors, including the Islamic financial industry in Indonesia. Islamic accounting, as a financial reporting system based on Islamic values, is required to adapt to digital transformation in order to maintain its relevance. This article aims to analyze how digital transformation affects Islamic accounting practices and to examine its contribution to enhancing transparency and public trust in Islamic financial institutions. The method employed is a descriptive-conceptual literature review by analyzing various scientific sources, regulations, and official reports from relevant institutions for the period 2015–2025. The findings indicate that the adoption of technologies such as blockchain, artificial intelligence, and cloud computing significantly improves the accuracy, accessibility, and timeliness of Islamic financial reporting. Enhanced transparency through digitalization has been proven to contribute positively to public trust in Islamic financial institutions. Nevertheless, challenges related to human resource readiness, regulatory gaps, and public digital literacy still need to be addressed systematically.

Keywords **:** *Islamic Accounting, Digitalization, Transparency, Public Trust, Islamic Financial Institutions.*

How to Cite this article (APA 7 th Edition):
Wahyudi, I., Kadariah, S., & Hasan, Z. (2026). Transformasi Akuntansi Syariah di Era Digital sebagai Landasan Transparansi dan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Tasharruf : Journal of Islamic Economics and Business*, *7*(1), 01–14. https://doi.org/10.55757/tasharruf.v7i1.1271

Copyright © 2026 The Author(s) | Published by: Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk beragama Islam mencapai lebih dari 230 juta jiwa atau sekitar 87 persen dari total penduduk nasional. Kondisi demografis ini menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial yang sangat strategis bagi perkembangan industri keuangan syariah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset perbankan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang konsisten dan melampaui angka Rp 900 triliun pada tahun 2024 (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024). Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Di samping itu, merger tiga bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021 turut memperkuat posisi perbankan syariah nasional di kancah regional bahkan global, sekaligus membuka babak baru dalam pengelolaan keuangan syariah yang lebih terintegrasi dan profesional.

Seiring dengan pertumbuhan industri keuangan syariah yang pesat, kebutuhan akan sistem akuntansi yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam menjadi semakin mendesak. Akuntansi syariah bukan sekadar instrumen pencatatan keuangan biasa, melainkan merupakan sistem pelaporan yang sarat nilai-nilai moral dan spiritual Islam, mencakup prinsip kejujuran, keadilan, dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT sebagai pemilik hakiki segala amanah (Nafisa et al., 2025). Lembaga keuangan syariah sebagai pengemban amanah umat memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menyajikan laporan keuangan yang tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga mencerminkan integritas syariah dalam setiap aspek pengelolaannya. Kegagalan dalam memenuhi standar akuntansi yang baik berpotensi merusak kepercayaan publik yang menjadi fondasi utama keberlangsungan lembaga keuangan syariah (Rahmawati, 2022).

Era revolusi industri 4.0 dan kini memasuki era society 5.0 telah membawa gelombang transformasi digital yang mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dunia akuntansi dan keuangan secara fundamental. Teknologi-teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan, blockchain, komputasi awan, big

data analytics, dan Internet of Things (IoT) kini bukan lagi sekadar wacana futuristik, melainkan telah menjadi instrumen nyata dalam modernisasi sistem akuntansi di berbagai belahan dunia (Fitriyadi, 2019). Adopsi teknologi-teknologi tersebut terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional, akurasi pelaporan, dan kecepatan pengambilan keputusan secara dramatis. Bagi industri keuangan syariah, gelombang transformasi digital ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan besar. Di satu sisi, teknologi digital menawarkan solusi inovatif untuk berbagai keterbatasan sistem akuntansi syariah yang masih bersifat manual dan konvensional. Di sisi lain, adopsi teknologi yang tidak terencana dengan baik berpotensi menimbulkan risiko baru yang dapat mengancam integritas dan kepatuhan syariah dalam pengelolaan keuangan (Bakhri et al., 2023).

Transparansi dan kepercayaan publik merupakan dua pilar fundamental yang menopang keberlangsungan dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah dalam jangka panjang. Tanpa kepercayaan publik, lembaga keuangan syariah akan kehilangan legitimasinya di mata masyarakat, sekalipun secara teknis telah memenuhi seluruh ketentuan regulasi yang berlaku. Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas suatu lembaga keuangan berpengaruh signifikan terhadap keputusan mereka untuk menggunakan produk dan layanan lembaga tersebut (Windasari, 2024). Dalam konteks keuangan syariah, dimensi kepercayaan memiliki kompleksitas tambahan karena melibatkan aspek kepatuhan syariah yang tidak selalu dapat diverifikasi secara langsung oleh masyarakat awam. Oleh karena itu, pengungkapan informasi keuangan yang transparan, komprehensif, dan mudah dipahami menjadi instrumen krusial dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia (Bakhri et al., 2022).

Meskipun kerangka regulasi akuntansi syariah di Indonesia telah berkembang cukup pesat dengan diterbitkannya berbagai PSAK Syariah oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta fatwa-fatwa terkait dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), implementasi standar-standar tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Sejumlah penelitian menemukan adanya gap yang signifikan antara ketentuan standar akuntansi syariah dengan praktik pelaporan keuangan yang sesungguhnya

dijalankan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah, terutama di segmen koperasi syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan lembaga keuangan mikro syariah. Kesenjangan ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi syariah, minimnya infrastruktur teknologi yang mendukung, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap standar pelaporan yang berlaku. Kondisi ini secara langsung berdampak pada kualitas informasi keuangan yang tersedia bagi para pemangku kepentingan dan berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap sektor keuangan syariah secara keseluruhan (Ilyas, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, jelas terlihat bahwa integrasi transformasi digital dengan sistem akuntansi syariah merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat ditunda lebih lama lagi. Kajian konseptual mengenai topik ini menjadi sangat relevan dan mendesak mengingat masih terbatasnya literatur ilmiah berbahasa Indonesia yang secara komprehensif membahas keterkaitan antara digitalisasi akuntansi syariah dengan transparansi dan kepercayaan publik dalam satu kerangka analisis yang terpadu. Artikel ini hadir untuk mengisi celah literatur tersebut dengan menawarkan tinjauan konseptual yang menyeluruh dan sistematis. Melalui sintesis berbagai penelitian terdahulu dan analisis regulasi terkini, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis yang bermakna sekaligus rekomendasi praktis bagi para pemangku kepentingan industri keuangan syariah, mulai dari regulator, praktisi, hingga akademisi, dalam merumuskan strategi transformasi digital yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam yang menjadi ruh dari seluruh sistem keuangan Islam.

Kajian Literatur

A. Konsep Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah merupakan suatu sistem pelaporan dan pencatatan keuangan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam, meliputi prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang berorientasi pada kepentingan pemegang saham (shareholder-oriented), akuntansi syariah memiliki orientasi yang lebih luas yakni mencakup pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku

kepentingan (stakeholder) dan kepada Tuhan sebagai pemilik hakiki segala sesuatu (Djamil, 2023).

Landasan normatif akuntansi syariah termaktub dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 yang secara eksplisit memerintahkan pencatatan transaksi secara benar dan berkeadilan. Ayat ini menjadi fondasi filosofis bagi seluruh praktik akuntansi dalam perspektif Islam. Selain itu, prinsip amanah (kepercayaan), adalah (keadilan), dan mashlahah (kemaslahatan umum) menjadi nilai-nilai inti yang membedakan akuntansi syariah dari sistem akuntansi lainnya.

B. Standar Akuntansi Syariah di Indonesia

Standar akuntansi syariah di Indonesia diatur melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK Syariah mencakup PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, PSAK 102 tentang akuntansi murabahah, PSAK 103 tentang akuntansi salam, PSAK 104 tentang akuntansi istishna', PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah, hingga PSAK 111 tentang akuntansi wa'd. Selain IAI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga memiliki peran strategis dalam menetapkan fatwa-fatwa yang menjadi dasar penyusunan produk dan standar akuntansi syariah di Indonesia. Pada tingkat internasional, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) berperan sebagai badan standardisasi akuntansi syariah global yang standar-standarnya menjadi rujukan berbagai negara, termasuk Indonesia dalam pengembangan PSAK Syariah (Alifa et al., 2025).

C. Transformasi Digital dalam Akuntansi

Transformasi digital dalam akuntansi merujuk pada proses adopsi dan integrasi teknologi digital ke dalam seluruh aspek sistem akuntansi, mulai dari pencatatan transaksi, pemrosesan data, hingga pelaporan keuangan (Novida, 2025). Beberapa teknologi kunci yang mendorong transformasi ini antara lain:

1. Blockchain, teknologi buku besar terdistribusi yang menjamin keamanan, transparansi, dan kekekalan data transaksi keuangan.

2. Kecerdasan Buatan (AI), yang mampu mengotomasi proses audit, deteksi kecurangan, dan analisis laporan keuangan secara real-time
3. Komputasi Awan (Cloud Computing), yang memungkinkan penyimpanan dan akses data keuangan secara fleksibel, efisien, dan aman.
4. Big Data Analytics, yang memungkinkan pengolahan data keuangan dalam jumlah besar untuk menghasilkan wawasan strategis bagi pengambilan keputusan.

D. Transparansi dan Kepercayaan Publik

Transparansi dalam perspektif syariah merupakan manifestasi dari prinsip keterbukaan dan kejujuran yang diwajibkan dalam setiap transaksi dan pengelolaan amanah. Lembaga keuangan syariah sebagai pengemban amanah umat berkewajiban menyajikan informasi keuangan yang jelas, akurat, dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Kepercayaan publik, di sisi lain, merupakan modal sosial yang krusial bagi keberlangsungan lembaga keuangan syariah. Teori kepercayaan publik menyatakan bahwa kepercayaan dibangun melalui konsistensi, kompetensi, dan transparansi dari pihak yang dipercaya. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, transparansi pelaporan keuangan yang didukung teknologi digital berperan sebagai penjembatan antara akuntabilitas institusional dan kepercayaan masyarakat (Windasari, 2024).

Metodologi

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif berbasis kajian literatur (library research). Sumber data yang digunakan meliputi jurnal ilmiah terindeks Scopus dan Sinta, buku teks akuntansi syariah, regulasi resmi OJK dan Bank Indonesia, laporan tahunan lembaga keuangan syariah, fatwa DSN-MUI, serta laporan BAZNAS dan lembaga terkait. Periode literatur yang dikaji mencakup tahun 2015 hingga 2025 guna memastikan relevansi dan kekiniannya.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dan sintesis literatur (literature synthesis). Melalui pendekatan ini, penulis mengidentifikasi, menelaah, dan mengintegrasikan berbagai temuan dari sumber-sumber yang relevan untuk membangun argumen konseptual yang koheren

mengenai transformasi digital akuntansi syariah dan implikasinya terhadap transparansi serta kepercayaan publik.

Pembahasan

A. Potret Akuntansi Syariah di Indonesia Saat Ini

Praktik akuntansi syariah di Indonesia saat ini berada dalam fase transisi yang kritis antara sistem konvensional yang masih dominan dengan tuntutan modernisasi yang semakin mendesak. Kerangka regulasi akuntansi syariah di Indonesia sesungguhnya telah dibangun secara bertahap dan cukup sistematis sejak diterbitkannya PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah pada tahun 2002, yang kemudian direvisi dan diperluas menjadi serangkaian PSAK Syariah (PSAK 101 hingga PSAK 111) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar-standar ini disusun dengan mengacu pada ketentuan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) serta disesuaikan dengan konteks hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Di tingkat pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan berbagai Peraturan OJK (POJK) yang mengatur tata kelola dan pelaporan keuangan lembaga keuangan syariah, termasuk kewajiban penyampaian laporan keuangan secara berkala dalam format yang terstandarisasi (Rahmawati, 2022).

Meskipun kerangka regulasi telah cukup komprehensif, implementasi standar akuntansi syariah di lapangan masih menemui berbagai hambatan yang bersifat struktural. (Zulkifli et al., 2019) dalam penelitiannya terhadap Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Pekanbaru menemukan bahwa lembaga keuangan syariah berskala kecil masih belum sepenuhnya menerapkan ketentuan PSAK Syariah dalam penyajian laporan keuangannya, terutama terkait komponen laporan yang tidak lengkap dan penggunaan istilah akun yang belum disesuaikan dengan standar yang berlaku. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi syariah, minimnya infrastruktur teknologi pendukung, serta rendahnya pemahaman manajemen terhadap urgensi kepatuhan standar akuntansi. Akibatnya, kualitas informasi keuangan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga tersebut seringkali tidak memadai untuk memenuhi

kebutuhan para pemangku kepentingan, baik nasabah, regulator, maupun investor yang membutuhkan informasi yang akurat, andal, dan dapat diperbandingkan (Darista, 2025).

Kesenjangan implementasi tersebut membawa implikasi serius bagi kredibilitas industri keuangan syariah secara keseluruhan. Ketidakseragaman kualitas pelaporan keuangan antarinstansi menciptakan asimetri informasi yang merugikan bagi pengguna laporan keuangan, sekaligus menyulitkan regulator dalam melakukan pengawasan yang efektif dan komprehensif. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menghambat pertumbuhan industri keuangan syariah karena investor institusional dan masyarakat yang semakin kritis akan cenderung mengalihkan kepercayaan mereka ke lembaga keuangan yang menawarkan transparansi dan akuntabilitas lebih tinggi. Oleh karena itu, transformasi menyeluruh dalam sistem akuntansi syariah, dengan dukungan teknologi digital sebagai enabler utama, menjadi kebutuhan strategis yang tidak dapat ditunda lebih lama lagi bagi industri keuangan syariah Indonesia (Novida, 2025).

B. Transformasi Digital dalam Praktik Akuntansi Syariah

Adopsi teknologi blockchain dalam sistem akuntansi syariah membawa potensi transformatif yang sangat signifikan, terutama dalam konteks pencatatan transaksi yang bersifat *immutable* (tidak dapat diubah), transparan, dan dapat diverifikasi oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Karakteristik fundamental blockchain yang terdesentralisasi, yakni tidak bergantung pada satu otoritas tunggal dalam pengelolaan data, secara inheren selaras dengan prinsip-prinsip Islam mengenai kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dalam setiap transaksi muamalah. Setiap akad syariah, baik murabahah, mudharabah, musyarakah, maupun ijarah, yang dicatat dalam sistem blockchain akan tersimpan secara permanen dengan jejak audit yang lengkap dan tidak dapat dimanipulasi oleh pihak manapun. Beberapa lembaga keuangan syariah di tingkat global, seperti Bank Islam Malaysia Berhad dan sejumlah institusi keuangan syariah di kawasan Teluk Arab, telah mulai mengeksplorasi dan mengimplementasikan blockchain untuk pencatatan akad serta penyelesaian

transaksi keuangan syariah mereka, memberikan bukti nyata bahwa teknologi ini compatible dengan kebutuhan industri keuangan Islam (Sheela, 2023).

Penerapan kecerdasan buatan dalam proses audit dan pengawasan kepatuhan syariah merupakan inovasi lain yang tengah berkembang pesat dan memberikan dampak yang sangat berarti bagi industri keuangan syariah. Sistem berbasis AI mampu menganalisis ribuan hingga jutaan transaksi keuangan dalam waktu yang sangat singkat, mengidentifikasi anomali atau pola transaksi yang mengindikasikan potensi pelanggaran prinsip syariah, serta menghasilkan laporan audit yang jauh lebih komprehensif, akurat, dan efisien dibandingkan dengan pendekatan audit manual yang konvensional. Lebih dari itu, machine learning sebagai cabang dari AI dapat dilatih untuk mengenali karakteristik transaksi yang tidak sesuai syariah berdasarkan pola data historis, sehingga kemampuan deteksinya terus meningkat seiring berjalannya waktu. Dalam konteks Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah terbesar nasional telah mengintegrasikan teknologi AI dalam sistem deteksi kecurangan, pengelolaan risiko operasional, dan analisis perilaku nasabah, yang secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan kepatuhan syariah dalam operasional sehari-hari (Pratama & Ramadani, 2025).

Komputasi awan membuka akses yang lebih demokratis bagi lembaga keuangan syariah dari berbagai skala untuk mengadopsi infrastruktur akuntansi yang modern dan canggih tanpa harus menanggung beban investasi awal yang besar dalam bentuk perangkat keras dan perangkat lunak yang mahal. Model layanan Software as a Service (SaaS) berbasis cloud memungkinkan lembaga keuangan syariah berskala kecil seperti BMT dan koperasi syariah untuk menggunakan sistem akuntansi terintegrasi yang sebelumnya hanya terjangkau oleh institusi besar. Digitalisasi laporan keuangan berbasis cloud juga memungkinkan akses real-time terhadap data keuangan oleh berbagai pemangku kepentingan yang berwenang, termasuk regulator, auditor eksternal, dan manajemen puncak, sehingga meningkatkan aksesibilitas dan ketepatan waktu informasi keuangan secara dramatis. Selain itu, big data analytics yang dijalankan di atas infrastruktur cloud memberikan kemampuan analisis mendalam terhadap data keuangan dalam jumlah besar, menghasilkan

wawasan strategis yang sangat berharga bagi pengambilan keputusan manajemen lembaga keuangan syariah (Darista, 2025).

Transformasi digital yang paling efektif dalam akuntansi syariah bukan terjadi melalui adopsi teknologi secara terpisah-pisah, melainkan melalui integrasi holistik berbagai teknologi tersebut dalam satu ekosistem digital syariah yang terpadu dan saling mendukung (Pratama & Ramadani, 2025). Dalam ekosistem ideal ini, blockchain berfungsi sebagai lapisan pencatatan transaksi yang aman dan transparan, AI berperan sebagai mesin analisis dan pengawas kepatuhan syariah otomatis, cloud computing menyediakan infrastruktur yang skalabel dan fleksibel, sementara big data analytics mengolah seluruh data yang dihasilkan untuk menghasilkan informasi strategis bagi manajemen dan pemangku kepentingan. Ekosistem digital terintegrasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional secara dramatis, tetapi juga menciptakan sistem akuntansi syariah yang secara inheren transparan, akuntabel, dan dapat diaudit secara real-time, sehingga menjawab tuntutan masyarakat modern yang semakin kritis terhadap pengelolaan keuangan berbasis syariah (Windasari, 2024).

C. Dampak Transformasi Digital terhadap Transparansi

Transformasi digital dalam akuntansi syariah berkontribusi secara langsung dan terukur terhadap peningkatan transparansi melalui beberapa mekanisme yang saling berkaitan. Pertama, kemampuan real-time reporting yang dimungkinkan oleh kombinasi teknologi cloud dan AI memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengakses informasi keuangan terkini kapan saja dan di mana saja melalui berbagai platform digital, sehingga mengurangi secara signifikan asimetri informasi yang selama ini menjadi salah satu kendala utama transparansi dalam industri keuangan syariah. Kedua, teknologi blockchain memberikan jaminan integritas data keuangan yang belum pernah ada sebelumnya, karena setiap transaksi yang telah dicatat dalam distributed ledger tidak dapat diubah, dihapus, atau dimanipulasi oleh pihak manapun tanpa meninggalkan jejak yang dapat dideteksi (Novida, 2025).

Hal ini secara efektif menutup celah bagi praktik-praktik manipulasi laporan keuangan seperti window dressing yang berpotensi merugikan

berbagai pihak. Ketiga, digitalisasi memungkinkan pengungkapan informasi yang lebih komprehensif dan terstruktur melalui laporan keuangan digital yang interaktif, memudahkan berbagai kalangan pemangku kepentingan, termasuk yang tidak memiliki latar belakang keuangan, untuk memahami kondisi dan kinerja keuangan lembaga keuangan syariah (Nurita & Sisdianto, 2025).

Dimensi transparansi yang paling krusial bagi lembaga keuangan syariah bukan hanya transparansi finansial semata, melainkan juga transparansi mengenai kepatuhan syariah dalam setiap produk dan transaksi yang ditawarkan. Teknologi digital membuka peluang bagi lembaga keuangan syariah untuk mewujudkan transparansi kepatuhan syariah yang lebih mendalam dan dapat diverifikasi secara independen oleh masyarakat. Laporan kepatuhan syariah yang diterbitkan secara digital dan mudah diakses publik, ditambah dengan sistem verifikasi berbasis blockchain yang memungkinkan penelusuran akad dari hulu ke hilir, dapat menjadi bukti konkret komitmen lembaga keuangan syariah terhadap nilai-nilai Islam yang dianutnya (Kamal et al., 2025). Dalam konteks ini, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah juga berperan penting dalam memastikan bahwa proses digitalisasi tidak mengorbankan aspek kepatuhan syariah, melainkan justru memperkuatnya melalui pengawasan yang lebih sistematis dan berbasis data.

Di balik berbagai manfaat yang ditawarkannya, transformasi digital juga memunculkan tantangan baru yang perlu diantisipasi dalam upaya mewujudkan transparansi yang sesungguhnya. Keamanan siber menjadi isu kritis yang tidak dapat diabaikan, mengingat sistem keuangan digital yang canggih sekalipun rentan terhadap serangan peretas yang dapat mengkompromikan integritas dan kerahasiaan data keuangan. Insiden kebocoran data atau serangan siber pada lembaga keuangan syariah tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi dan kepercayaan publik secara serius dan dalam jangka panjang (Windasari, 2024). Selain itu, kompleksitas teknologi yang digunakan dapat menjadi penghalang bagi masyarakat awam untuk memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan digital, sehingga transparansi teknis yang diwujudkan melalui

digitalisasi belum tentu berkorelasi langsung dengan transparansi yang dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh publik umum. Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi keuangan dan digital masyarakat harus berjalan seiring dengan proses digitalisasi akuntansi syariah agar manfaat transparansi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat (Ilyas, 2020).

Kesimpulan

Transformasi digital dalam akuntansi syariah bukan sekadar modernisasi teknis, melainkan sebuah keniscayaan strategis yang selaras dengan nilai-nilai Islam tentang kejujuran, keadilan, dan pertanggungjawaban. Adopsi teknologi blockchain, kecerdasan buatan, dan komputasi awan telah terbukti secara signifikan meningkatkan akurasi, aksesibilitas, dan ketepatan waktu pelaporan keuangan syariah di Indonesia.

Peningkatan transparansi yang dihasilkan dari digitalisasi berkontribusi positif terhadap kepercayaan publik, yang merupakan modal sosial utama bagi keberlangsungan lembaga keuangan syariah. Teknologi blockchain khususnya menawarkan jaminan integritas data yang selaras dengan prinsip amanah dalam Islam, sementara AI memperkuat pengawasan kepatuhan syariah secara otomatis dan berkelanjutan.

Namun demikian, manfaat transformasi digital ini belum dapat dinikmati secara merata. Kesenjangan kompetensi sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur teknologi pada lembaga keuangan syariah berskala kecil, kesenjangan regulasi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta ancaman keamanan siber menjadi hambatan struktural yang masih perlu diatasi secara sistemis dan menyeluruh.

Referensi

Alifa, L., Yuniarni, R., & Putra, R. (2025). *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pada PT Bank Syariah Indonesia (Persero)*. *01*(05), 299–312.

Bakhri, S., Firdaus, S., Islam, U., Maulana, N., Ibrahim, M., Pasuruan, I. S., Tinggi, S., Islam, A., & Pasuruan, S. (2023). *Keuangan Sosial Islam dalam Tinajuan Maqosid Syariah*. *04*(02), 75–94.

Bakhri, S., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Peran Lembaga Keuangan Syariah

dalam Industri Halal sudut Pandang Maqosid Syariah. *Tasharruf : Journal of Islamic Economics and Business*, *3*(1), 11–29. https://doi.org/10.55757/tasharruf.v3i1.88

Darista, N. (2025). *Analisis Kesenjangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Audit Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Islam*. *2*(5).

Djamil, N. (2023). *Akuntansi Terintegrasi Islam : Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan*. *1*(1), 1–10.

Fitriyadi, G. M. (2019). Analisis Mitigasi Resiko Financial Technology Peer To Peer (P2P) Lending dalam Penyaluran Pembiayaan Terhadap UMKM di Indonesia (Studi Kasus PT. Ammana Fintek Syariah). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *7*(2), 2–13.

Ilyas, R. (2020). *Akuntansi syariah sebagai sistem informasi*. *4*(2), 209–221.

Kamal, M., Sagala, A., & Kunci, K. (2025). Analisis Literatur atas Peran Akuntansi Syariah dalam Pengungkapan Transparansi dan Tanggung Jawab Sosial di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, *8*(1), 307–317.

Nafisa, Z. K., Aqwam, M. F. R., Firmansyah, R., Dwi, F., Salsabila, N., & Pratasya, A. Z. (2025). Relevansi Konsep Ekonomi Islam dalam Era Digital. *Musytari : Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*, *17*(2).

Novida, D. R. (2025). Evolusi Sistem Informasi Akuntansi dalam Era Digital : Tinjauan Literatur tentang Tren ,. *Jurnal Minfo Polgan*, *14*, 77–85.

Nurita, V., & Sisdianto, E. (2025). Peran Akuntansi Lingkungan dalam Pengungkapan Informasi Keberlanjutan pada Laporan Keuangan di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *2*(1), 406–418. https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jemba/article/view/650

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Maret 2024*.

Pratama, A. R., & Ramadani, N. (2025). Transformasi Konsep Dasar Akuntansi Syariah dalam Era Digital: Peluang dan Tantangan. *Indonesia Economic Journal*, *1*(2), 403–410.

Rahmawati, Y. (2022). *Akuntansi Syariah di Indonesia dalam Era Digital*.

Sheela, P. (2023). Fintech and Islamic banking: A systematic view and future research agenda. *Fintech Applications in Islamic Finance AI Machine Learning and Blockchain Techniques*, 1–23. https://doi.org/10.4018/9798369310380.ch001

Windasari, I. (2024). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam*. *1*(Juli).

Zulkifli, Bakhri, B. S., & Rahmawati. (2019). Analisis Penyajian laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Pekanbaru. *A-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, *16*(1).